

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Komunikasi berasal dari kata latin *communicatus*, yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. definisi komunikasi dapat dikatakan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama atau mempengaruhi perilaku orang lain. Komunikasi tidak hanya terjadi antara dua orang, namun juga dapat terjadi dalam kelompok atau bahkan dalam skala yang lebih besar seperti komunikasi antar negara. Selain itu, komunikasi juga melibatkan banyak aspek, seperti bahasa, nada suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai faktor tersebut dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik agar pesan tersampaikan dengan baik.

Komunikasi memang memiliki makna yang sangat beragam dan penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, komunikasi juga memiliki banyak cara dan bentuk, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih mudah dan cepat, seperti melalui pesan singkat atau *video call*. Penting untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain.

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki kewenangan dalam beberapa hal seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Desa memiliki kepala desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya yang ada. Melalui otonomi desa, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam mengatur urusan pemerintahannya, membangun potensi

lokal, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.

Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan di suatu daerah. Pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menciptakan perubahan nyata kepada masyarakat dalam aspek sosial serta ekonomi. Melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu indikator yang dapat digunakan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Peningkatan perekonomian masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, baik di daerah maupun nasional (Khasanah & Mustamin Riyaur, 2021). Masyarakat juga didorong untuk menyadari potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan sekitar agar dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, terutama tingkat kemiskinan. Dengan demikian, kemandirian ekonomi dapat terwujud.

Dalam menjalankan kewenangannya, kepala desa harus memahami peraturan yang berlaku, seperti dalam UU Desa No.6 Tahun 2014, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepala desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga desa. Kepala desa beserta perangkat desa memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Seorang kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengkoordinasi semua elemen masyarakat desa untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah dan membangun desa. Kepala desa juga harus mampu membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat pemerintahan daerah, provinsi, maupun tingkat nasional, sehingga dapat

memperoleh dukungan dan bantuan yang dibutuhkan dalam pembangunan desa. Dengan kapasitas dan kemampuan yang memadai, diharapkan kepala desa dapat menjalankan tugas dengan optimal dan dapat meningkatkan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik, kepala desa perlu memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat desanya. Selain itu, penting bagi kepala desa untuk membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kerjasama antara pemerintah pusat, desa, dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya memajukan desa. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintahan pusat, desa dan masyarakat dalam memajukan desa.

Peningkatan kemampuan aparatur desa di segala bidang, sangat penting untuk menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi dan kemampuan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ekonomi seperti badan usaha milik desa (Bumdes) dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan memperdayakan masyarakat setempat.

Pembentukan badan usaha milik negara dapat menjadi solusi untuk pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan mengembangkan perekonomian desa. Selain itu, Bumdes juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya Bumdes, masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal dan mengambil keputusan bersama dalam pengembangan usaha di desa. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, berkelanjutan, serta berdampak secara jangka Panjang. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dengan fokus pada memperkuat dan mengembangkan perekonomian desa. (Luh et al., 2019).

Dengan membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah desa bersama BUMDes dapat mengelola potensi unik yang dimiliki desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian desa secara optimal dan berkelanjutan.

Desa yang memiliki sumber daya khusus memerlukan upaya kreatif untuk mengembangkan modal sosialnya agar tetap memiliki daya saing dalam era persaingan bebas. Dengan adanya BUMDes, diharapkan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, BUMDes dapat memanfaatkan dan mengelola potensi desa secara efektif dan efisien, termasuk produk-produk unggulan desa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa beserta perangkat desa harus mampu mengembangkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk dalam hal memahami kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan desa. Diharapkan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, salah satunya melalui lembaga ekonomi yang ada di desa yakni badan usaha milik desa. Lembaga ekonomi ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh desa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Sembiring, 2017).

Peningkatan modal sosial melalui BUMDes dan UMKM di desa merupakan upaya yang krusial untuk menjaga kontribusi desa dalam pembangunan ekonomi daerah melalui BUMDes dan UMKM, desa juga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan desa. Dengan adanya regulasi yang tepat, BUMDes dapat berperan sebagai agen pembangunan ekonomi

desa dan memfasilitasi upaya-upaya kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara berkelanjutan.

Desa wisata memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari daerah pedesaan biasa. Desa ini menawarkan pengalaman yang autentik tentang kehidupan serta budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengembangkannya, kampung wisata dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, serta melestarikan warisan budaya dan lingkungan. Masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan wisata yang mereka tawarkan, melalui pelatihan atau diklat yang mereka ikuti.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan budaya lokal mereka, sehingga memperkuat identitas dan nilai-nilai budaya daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial/ekonomi masyarakat setempat.

Tujuan pengembangan kampung melati ini perlu dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini bisa datang dari pemerintah setempat, pengusaha, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Pemerintah dapat membantu dalam memfasilitasi dan memberikan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, seperti dana, infrastruktur, dan perijinan. Pengusaha dapat memberikan kontribusi dalam hal pengelolaan dan pemasaran desa wisata. Organisasi masyarakat juga dapat membantu dalam hal pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan hadirnya konsep wisata kampung melati akan memberikan peluang besar kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi. Mengingat potensi kampung melati di dusun talkandang timur berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan wisata kampung melati menuju desa wisata. dengan judul “Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Wisata Kampung Melati di Desa Talkandang.” Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan wisata kampung melati di Desa Talkandang?
3. Faktor apa saja yang mendukung strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.
2. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan wisata kampung melati di desa Talkandang.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Menjadi manfaat dan memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.

1.4.2 Manfaat secara akademis

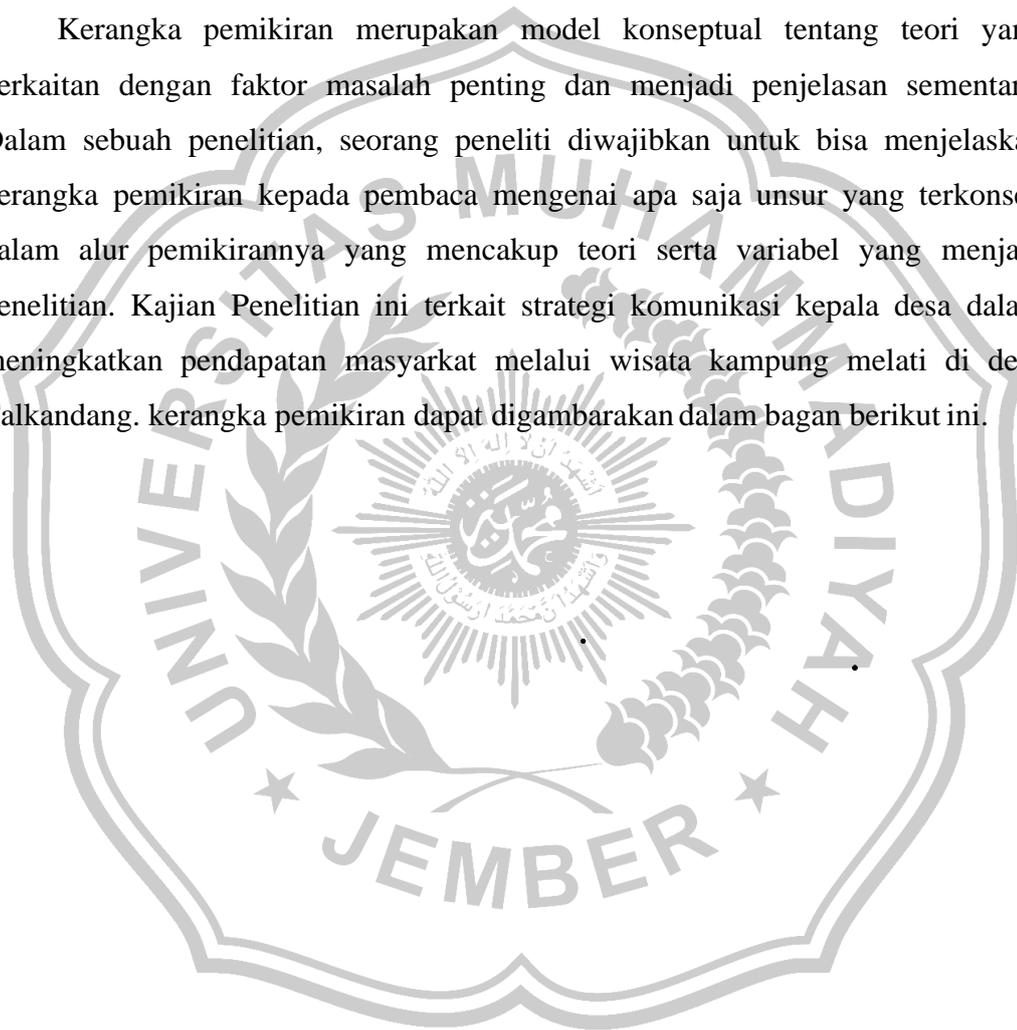
Secara Akademis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jember.

1.4.3 Manfaat secara praktis

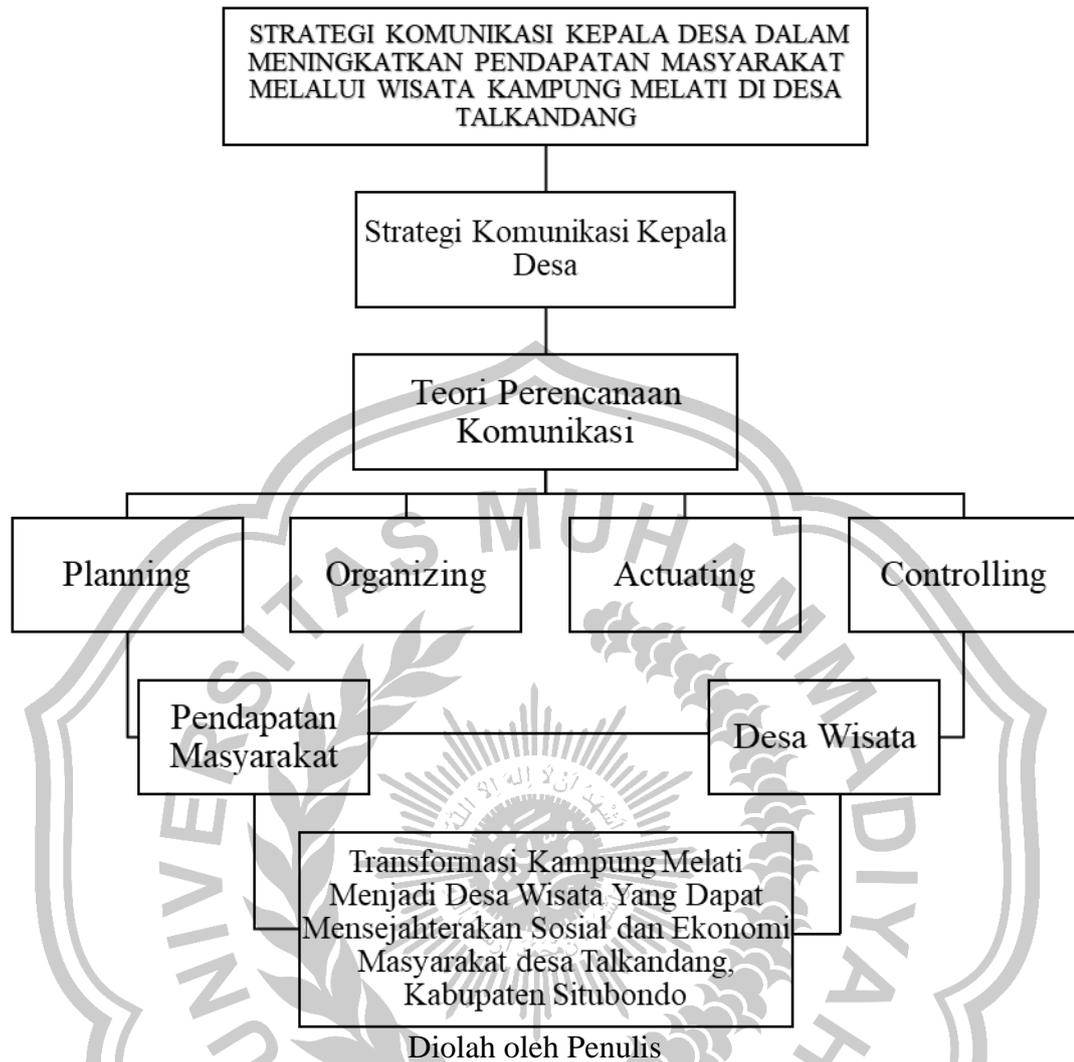
Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan desa wisata kampung melati untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

1.5 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang teori yang berkaitan dengan faktor masalah penting dan menjadi penjelasan sementara. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diwajibkan untuk bisa menjelaskan kerangka pemikiran kepada pembaca mengenai apa saja unsur yang terkonsep dalam alur pemikirannya yang mencakup teori serta variabel yang menjadi penelitian. Kajian Penelitian ini terkait strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati di desa Talkandang. kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati di desa Talkandang. merupakan penelitian yang berfokus pada Strategi Komunikasi Kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kampung melati.

Penelitian ini ingin mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan kepala desa berhasil tidaknya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kampung melati di desa talkandang. Dari bagan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Planning: Proses dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama secara keseluruhan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan

aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Tahap perencanaan melibatkan pengidentifikasian tujuan, merumuskan strategi dan rencana mencapai tujuan tersebut, serta menentukan langkah-langkah yang akan di ambil. Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) Planning adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan yang di inginkan. (Saputra & Ali, 2022)

2. Organizing: Pengorganisasian didefinisikan sebagai kegiatan berbagi tugas, tahap pengorganisasian melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim atau departemen yang relevan, menyusun struktur organisasi yang efektif, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Menurut George R. Terry, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu.
3. Actuating: Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Tahap melaksanakan atau bertindak melibatkan pelaksanaan rencana dan strategi yang telah di tetapkan, mengkoordinasikan aktivitas antara anggota tim atau departemen, serta menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan.
4. Controlling: Tahap pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, pengukuran terhadap kinerja dan hasil yang dicapai, serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang di inginkan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.

Semakin maju teknologi dan meningkatnya kebutuhan hidup membuat pemerintahan desa harus terus berinovasi dan berevolusi dalam hal meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya. Diawali dengan perencanaan pembangunan wisata yang berkelanjutan, agar tercapainya tujuan dari pembangunan dan pengembangan wisata kampung melati menuju desa wisata.

1.6 Hipotesis

Terdapat beberapa hipotesis dari sumber rumusan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan kampung melati ke arah desa wisata, mengadakan pelatihan peningkatan perekonomian masyarakat, memberikan kemudahan masyarakat dalam penambahan modal usaha adalah strategi komunikasi kepada desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.
2. Pembentukan kelompok tani kampung melati, pemanfaatan perkumpulan masyarakat yang ada di desa, pemanfaatan media sosial kelompok informasi masyarakat adalah respons masyarakat dalam terhadap strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.
3. Tingkat pendidikan kepala desa, tingkat kemampuan ekonomi kepala desa, tingkat interaksi sosial kepala desa adalah faktor yang mendukung strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui wisata kampung melati.

